Abstract

The development of information and communication technology has significantly impacted social life, including in the aspect of crime. One form of crime that has changed pattern due to technology is prostitution. While prostitution was previously conducted conventionally, it has now transformed into online prostitution by utilizing social media, chat applications, and specific websites as means of promoting and conducting sexual transactions covertly. A more concerning phenomenon is the involvement of children as perpetrators in online prostitution crimes. Children, who are inherently a vulnerable group and should be protected, are instead drawn into complex sexual crime networks.

This study aims to identify weaknesses in the law enforcement process against online prostitution crimes committed by children, as regulated explicitly in Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System for Children, which outlines the stages of handling criminal cases involving children, from investigation and prosecution to trial. The research method uses legal analysis with a normative-empirical approach, utilizing secondary data with primary sources. The research findings indicate that the legal enforcement process for children involved in online prostitution should prioritize restorative justice rather than punishment. The handling focuses on protection, guidance, and rehabilitation through diversion efforts at every stage, except for serious crimes. If diversion fails, the child is processed with conditional sanctions. Investigations are also time-limited to protect the child's rights and future.

Keywords: *Online Prostitution; Juvenile Crime; Law Enforcement; Restorative Justice*

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

ZUARIYA HASAN USMAN, NIM G01421029, ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Polda Gorontalo), Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, **Pembimbimng 1: Warsito Kasim, S.H., M.H** dan **Pembimbing 2: Dr. Rahmat Datau, S.H., M.Si**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, termasuk dalam aspek kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perubahan pola akibat teknologi adalah prostitusi. Jika sebelummnya prostitusi dilakukan secara konvensional, kini telah bermetamoforsis menjadi prostitusi online dengan memnfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, hingga situs tertentu sebagai sarana promosi dan transaksi seksual secara terselubung. Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah keterlibatan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana prostitusi online. Anak-anak yang sejatinya merupakan kelompok rentan dan harus mendapatkan perlindungan justru terseret dalam jaringan kejahatan seksual yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentfikasi kelemahan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online oleh anak yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur tahapan penanganan tindak pidana anak dari mulai penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Metode penelitian menggunakan analisa yuridis dengan pendekatan pendekatan normatif empiris yang menggunakan data sekunder dengan bahan primer. Hasil Penelitian menunjukan proses penegakan hukum terhadap anak pelaku prostitusi online harus mengutamakan keadilan restoratif, bukan penghukuman. Penanganannya berfokus pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi melalui upaya diversi di setiap tahap, kecuali untuk kejahatan berat. Jika diversi gagal, anak diproses dengan sanksi bersyarat. Penyidikan juga dibatasi waktunya agar tetap menjaga hak dan masa depan anak.

Kata kunci: *Prostitusi Online,Tindak Pidana Anak, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif.*

Dipindai dengan CamScanner